

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Hal ini mengingat bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang melanda perekonomian Indonesia, salah satunya adalah badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar serta beberapa bank di likuidasi. Namun ada beberapa sektor yang masih hidup di tengah gempuran badai krisis ekonomi tersebut, yaitu sektor ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Subanar, 2001).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa keberadaan UMKM dan pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Aufar, 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya mendominasi terhadap perekonomian suatu bangsa, baik dipertanian maupun pedesaan, tentang peran UMKM dilihat dari kedudukannya

yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, seperti penyedia lapangan kerja terbesar, berperan dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, dan untuk UMKM yang sudah mampu melakukan perdagangan internasional UMKM tersebut tentu mampu memberikan sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor (Rahmana 2009).

Secara umum usaha kecil memang termasuk dalam usaha yang memiliki kelemahan dari beberapa aspek seperti pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi, serta kerja sama yang masih rendah. Karena itulah usaha kecil perlu di berdayakan untuk meningkatkan daya bersaing dan kemandirian usahanya. Dari sinilah konsep pemberdayaan berkembang, terdapat suatu individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah pada beberapa aspek seperti; pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya adalah usaha mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga secara bertahap kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat (Tambunan, 2000).

Dari sudut pandang UMKM, bank dinilai memberikan biaya yang cukup besar untuk kredit modal kerja yang mereka ajukan, terlalu banyak jaminan, serta jumlah kredit modal kerja yang tidak sesuai dengan yang mereka ajukan. Selain itu ketidaktahuan tentang produk dan jasa kredit modal kerja yang dapat digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung usaha, menyebabkan mereka salah pilih dalam mengambil kredit modal kerja, salah mengelola pemanfaatan dana kredit

modal kerja serta tidak mengetahui bagaimana ketika terjadi resiko atas kredit modal kerja dalam berhubungan dengan perbankan. Kondisi ini diperburuk oleh sikap pegawai bank yang lebih menekankan tersalurkannya kredit modal kerja, diperolehnya nasabah baru, bahkan penawaran kartu kredit untuk pembiayaan usaha yang lebih praktis juga dapat dijadikan sumber dana usaha. Akibatnya pengelola UMKM menerima tawaran tersebut tanpa didukung kemampuan mengelolanya dengan baik.

Dalam intern perbankan sendiri juga terdapat beberapa hambatan terkait penyaluran kredit modal kerja kepada UMKM. Faktor pertama adalah ketersediaan tenaga SDM yang dimiliki bank, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak semua tenaga SDM memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang perkreditan. Mereka juga tidak serta merta dapat langsung terjun ke dalam bidang perkreditan yang serba kompleks. Tenaga junior masih membutuhkan transfer knowledge dari para senior mereka, dan ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di sisi lain, jumlah tenaga analis kredit dengan jumlah pihak yang mengajukan kredit cenderung tidak berimbang. Bisa jadi seorang analis kredit suatu bank menangani puluhan bahkan ratusan permohonan kredit. Kondisi ini pula yang akhirnya menyebabkan pihak perbankan mendapatkan sorotan minor dari masyarakat. Kedua, belum adanya pemeringkatan kredit dan sistem persetujuan kredit perbankan masih (banyak) menggunakan pola-pola tradisional sehingga interval waktu saat pengajuan kredit modal kerja hingga realisasi kredit memakan waktu relatif lama (Sukirno, 2004).

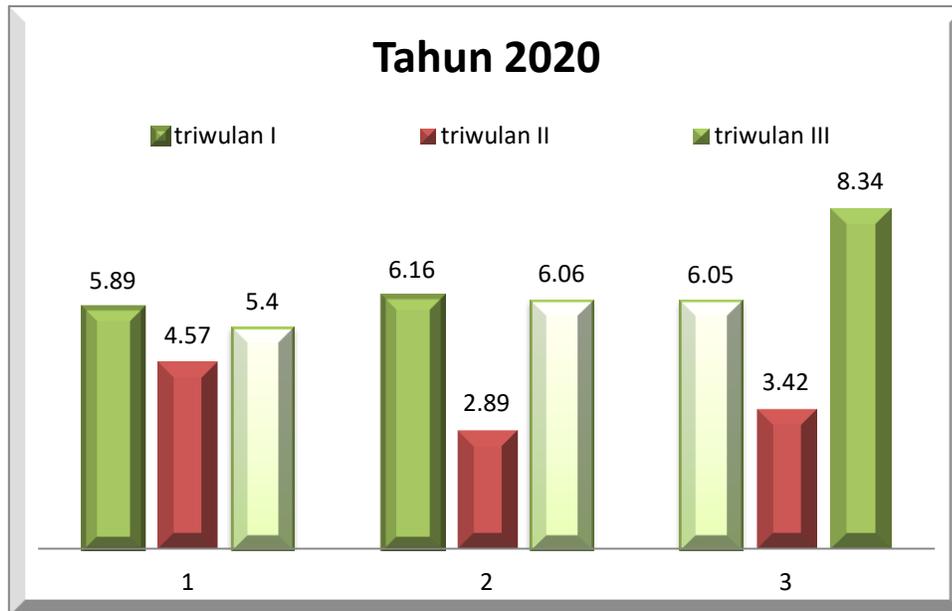
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ternate menyampaikan beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Ternate, yaitu 1) terbatasnya modal usaha, 2) masalah standarisasi produk, 3) masalah perizinan, dan 4) pemasaran.5) Permasalahan seperti ini biasanya dihadapi oleh pelaku usaha yang masih baru merintis usahanya. Oleh karena itu para pelaku UMK di Kota Ternate perlu mendapat perhatian guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Ternate memiliki peran penting dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kota Ternate.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, munculah Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, ditambah lagi dengan adanya himbauan “di rumah saja” membuat adanya batasan pergerakan orang dan barang yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal tersebut membuat terbatasnya operasi UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung. Kondisi seperti ini membuat pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19. Para penggerak UMKM perlu menciptakan terobosan dan strategi yang baru agar tetap bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi di suatu Daerah, dengan dukungan dari pemerintah. Bagaimana UMKM dapat bertahan semasa pandemi Covid-19 ini banyak menarik perhatian peneliti, diantaranya bagaimana kinerja UMKM dan bagaimana strategi bertahan UMKM tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan penurunan jumlah UMKM di Kota Ternate dalam kurun waktu triwulan pada tahun 2020, dan untuk

mengetahui perkembangan tersebut maka dapat di tunjukan melalu grafik sebagai berikut.

Grafik 1.1.  
Perkembangan UMKM Triwulan Tahun 2020 Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Ternate



Sumber: BPS Kota Ternate 2020

Dari grafik 1.1. yang telah di tunjukan di atas dapat diketahui bahwa pada masa pandemi covid-19 yang terjadi di Kota Ternate awal tahun 2020 dapat diketahui bahwa bahwa presentasi jumlah UMKM triwulan pertama sebesar 18.1% dan menurun pada triwulan kedua yaitu 10,88% dan kembali meningkat pada triwulan ketiga sebesar 19,8% dengan demikian dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM di Kota Ternate pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada tahu 2020 menunjukkan bahwa kondisi ini belum menunjukkan kondisi yang normal. upaya pemerintah guna mengatasi covid-19 pada saat itu dengan menghimbau masyarakt untuk menghindari kerumunan, tempat usaha (UMKM) tidak

bisa berjualan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan pendapatan para pelaku UMKM semakin menurun sehingga banyak UMKM yang tidak lagi berjualan (tutup usaha). Tetapi dengan adanya permasalahan seperti itu pemerintah dan masyarakat Kota Ternate bekerja sama dalam mengatasi masalah pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 kembali normal dan masyarakat kembali beraktifitas seperti biasa. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah UMKM di Kota Ternate.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis bertujuan meneliti mengenai dengan “ Pengaruh Peran Pemerintah Dan Kredit Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ternate” .

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran pemerintah (peningkatan UMKM) berpengaruh terhadap pendapatan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kota Ternate?
2. Apakah kredit modal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kota Ternate?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah peran pemerintah (peningkatan UMKM) berpengaruh terhadap pendapatan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kota Ternate?
2. Mengetahui apakah kredit modal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kota Ternate?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai peningkatan pendapatan UMKM pada masa pandemi Covid-19 melalui peran Pemerintah dan kredit modal di Kota Ternate.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi pemerintah daerah Kota Ternate pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM)